



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2021



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Alamat Jl. Brigjen Katamsi No. 2 Palangka Raya-Kalimantan Tengah 73112

Telp/ Fax. (0536) 3220517/ 3229663

Website : [www.dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id)

Email : [dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id)

## KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021**" ini dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa LKIP ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Palangka Raya, Februari 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah,



**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ix
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi .....	2
1.4 Susunan Struktur Organisasi .....	4
1.5 Keadaan Personil dan Kepegawaian .....	7
1.6 Sistematika Penyajian LKIP .....	12
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	14
2.1.1 Tujuan dan Sasaran .....	14
2.1.2 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	16
2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	18
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	24
3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	24
3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja .....	24
3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja .....	25
3.2 Evaluasi Kinerja.....	27
3.2.1 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap .....	27
3.2.2 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya .....	31
3.2.3 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Benih .....	35
3.2.4 Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan (AKI) .....	39

3.2.5	Indikator Kinerja Jumlah Luasan Konservasi Perairan .....	43	
3.2.6	Indikator Kinerja Jumlah Rehabilitasi Kawasan Pesisir .....	45	
3.2.7	Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Patuh terhadap Ketentuan/ Undang-Undang yang Berlaku .....	47	
3.2.8	Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemanfaatan SDKP .....	49	
3.3	Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	53	
3.3.1	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran .....	54	
3.3.2	Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran .....	55	
3.4	Analisis Dampak .....	56	
B.	Realisasi Anggaran .....	60	
3.5	Akuntabilitas Keuangan .....	60	
<b>BAB IV</b>			
<b>PENUTUP</b> .....			64
4.1	Capaian Kinerja IKU .....	64	
4.2	Permasalahan .....	66	
4.3	Upaya Tindak Lanjut .....	67	

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Komposisi Pegawai PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan .....</i>	8
Tabel 1.2	<i>Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional .....</i>	9
Tabel 1.3	<i>Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....</i>	10
Tabel 2.1	<i>IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 .....</i>	17
Tabel 2.2	<i>Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 .....</i>	18
Tabel 2.3	<i>Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 .....</i>	22
Tabel 3.1	<i>Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 .....</i>	26
Tabel 3.2	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 .....</i>	28
Tabel 3.3	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2016-2020 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah .....</i>	28
Tabel 3.4	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 .....</i>	32
Tabel 3.5	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2016-2020 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah .....</i>	32
Tabel 3.6	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Benih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 .....</i>	35
Tabel 3.7	<i>Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2016-2020 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Benih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 .....</i>	35
Tabel 3.8	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah .....</i>	39
Tabel 3.9	<i>Perbandingan Pergerakan Nilai AKI Kalteng dan Nasional dari Tahun 2016-2020 pada Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 .....</i>	40
Tabel 3.10	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Luasan Konservasi Perairan Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah .....</i>	44

Tabel 3.11	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah .....</i>	46
Tabel 3.12	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah .....</i>	47
Tabel 3.13	<i>Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah .....</i>	49
Tabel 3.14	<i>Jumlah POKMASWAS di Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2021 .....</i>	50
Tabel 3.15	<i>Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 .....</i>	51
Tabel 3.16	<i>Perbandingan Indikator Pencapaian dari Target terhadap Realisasi Tahun 2021 .....</i>	55
Tabel 3.17	<i>Kegiatan yang Secara Individual Tidak Efektif Namun Secara Bersama Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2021 .</i>	56
Tabel 3.18	<i>Kegiatan yang Tidak Efektif dan Tidak Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2021 .....</i>	56
Tabel 3.19	<i>Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 .....</i>	61
Tabel 3.20	<i>Perkembangan Daya Serap Keuangan Per Triwulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021</i>	62

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.1	<i>Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah .....</i>	6
Gambar 1.2	<i>Diagram Komposisi PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah ....</i>	7
Gambar 3.1	<i>Grafik Trend/ Kecenderungan Produksi Perikanan Budidaya di Kalteng sejak Tahun 2016-2020 .....</i>	33
Gambar 3.2	<i>Grafik Trend/ Kecenderungan Produksi Benih Ikan di Kalteng sejak Tahun 2016-2020 .....</i>	36
Gambar 3.3	<i>Grafik Pergerakan AKI Kalteng dan AKI Nasional Tahun 2016-2020 .....</i>	40
Gambar 3.4	<i>Efektifitas Kegiatan Terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2021 ..</i>	54
Gambar 3.5	<i>Efektifitas Kegiatan Terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2021 ..</i>	56

## DAFTAR LAMPIRAN

---

- Lampiran 1 : *Renstra-SKPD Tahun 2016-2021 (Formulir RS)*
- Lampiran 2 : *Rencana Kinerja Tahunan (Formulir RKT)*
- Lampiran 3 : *Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2021*
- Lampiran 4 : *Pengukuran Kinerja Tahun 2021 (Formulir PK)*
- Lampiran 5 : *Data Dukung Lainnya*

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntabel untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governace*). Akuntabilitas kinerja ini lebih difokuskan pada evaluasi kinerja yang bertujuan mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui analisis akuntabilitas kinerja yaitu :

- a. keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan tujuan, misi dan visi;
- b. keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan pencapaian sasaran.

Arah dan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi perikanan tangkap;
- b. Meningkatkan produksi perikanan budidaya;
- c. Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2020, antara lain meliputi :

- a. Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi perikanan tangkap (ton), target 130.526,10;
- b. Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi perikanan budidaya (ton), target 119.876,05;
- c. Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi benih (ekor), target 70.335.000;
- d. Tercapainya Angka Konsumsi Ikan; dengan indikator sasaran kinerja Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun), target 49,63;
- e. Terlaksananya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP yang optimal; dengan indikator sasaran kinerja Jumlah luasan konservasi perairan (Ha), target 61.362,24;

- f. Terlaksananya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP yang optimal; dengan indikator sasaran kinerja Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha), target 2,50;
- g. Terlaksananya pengawasan pemanfaatan SDKP; dengan indikator sasaran kinerja Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%), target 87,00; dan
- h. Terlaksananya pengawasan pemanfaatan SDKP; dengan indikator sasaran kinerja Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok), target 40,00.

Dari hasil penilaian terhadap 8 (delapan) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik, dengan 5 (lima) indikator kategori Sangat Baik dan 3 (tiga) indikator dalam kategori Baik.

Terdapat 3 (tiga) indikator dengan kategori BAIK (hijau), yaitu pada indikator kinerja berikut ini: **Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP** dengan indikator *Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha)* dengan tingkat capaiannya sebesar **100,00 %**; **Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP** dengan indikator *Jumlah Luasan rehabilitasi Kawasan Pesisir (Ha/Tahun)* dengan capaian sebesar **100,00 %**; dan **Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP** dengan indikator *Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)* dengan tingkat capaiannya sebesar **100,00 %**.

Sedangkan prestasi kinerja kategori SANGAT BAIK (biru) dicapai pada indikator kinerja berikut ini: **Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap** dengan indikator *Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)* sebesar **127,38%**; **Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)* sebesar **101,75%**; **Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Jumlah Produksi Benih (ekor/tahun)* sebesar **100,73%**; **Tercapainya Angka Konsumsi Ikan** dengan indikator *Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)* sebesar **108,81%**; dan **Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP** dengan indikator *Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POMASWAS) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)* sebesar **132,50%**.

## **B. Realisasi Anggaran**

Untuk penilaian kinerja keuangan terkait dukungan terhadap kegiatan strategis diukur melalui realisasi keuangan. Di tahun 2021 realisasi keuangan terhadap program/ kegiatan terkait kegiatan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp.13.636.876.890,- (94,21%) dari pagu anggaran Rp.14.333.089.575,-.

## **C. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut**

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja selama Tahun 2021, yaitu meliputi :

- a. Lemahnya data perikanan.
- b. Tingginya harga pakan ikan.
- c. Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul.
- d. Terjadinya perubahan musim yang ekstrim.
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.
- f. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- g. Pengaruh cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang tinggi di laut, dimana mempengaruhi jumlah trip operasi penangkapan.

- h. Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.
- i. Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap.
- j. Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.
- l. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat.
- m. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.
- n. Terjadinya pandemic covid-19 yang membuat aktivitas pelaku usaha perikanan tidak berjalan dengan maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- a. Rehabilitasi/ pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan.
- b. Mendorong percepatan operasional unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- c. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba.
- d. Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya.
- e. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya.
- f. Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan, pameran dan promosi produk hasil perikanan, serta ragam produk olahan bernilai tambah.
- g. Koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral).
- h. Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda).
- i. Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat.
- j. Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada.
- k. Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.
- l. Ikut mensosialisasikan program-program pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 di Kalimantan Tengah dan mengoptimalkan peran media sosial maupun website yang dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalin komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, stakeholder terkait, pelaku usaha perikanan dan masyarakat luas.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang**

**U**ntuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* (sah) demi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu pilar sebagai elemen dasar dari pemerintahan yang baik tersebut adalah Akuntabilitas, yang dalam perspektif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Alat pertanggungjawaban tersebut adalah sebuah sistem yang diharuskan kepada sebuah organisasi untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), mengingat Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk (a) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan (b) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang

uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut adalah dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) pembangunan jangka menengah yang disusun secara periode lima tahunan. Pada tahun 2021, sebagai acuan dalam perencanaan strategis program dan kegiatan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut diantaranya memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

## **1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagai salah satu unit organisasi perangkat kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT);
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

#### **1.4 Susunan Struktur Organisasi**

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan kepegawaian sebagai berikut:

**1) Kepala Dinas**

**2) Sekretariat;** terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Penyusunan Program
- b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

**3) Bidang- Bidang;** terdiri dari :

- a. Bidang Kelautan dan Pesisir, membawahkan :
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
  - Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan
  - Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
- b. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
  - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
  - Seksi Usaha Perikanan Tangkap
  - Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- c. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran membawahkan :
  - Seksi Perikanan Budidaya
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran
  - Seksi Standarisasi Usaha
- d. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
  - Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan
  - Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan
  - Seksi Penanganan Pelanggaran

**4) Kelompok Jabatan Fungsional;** dan

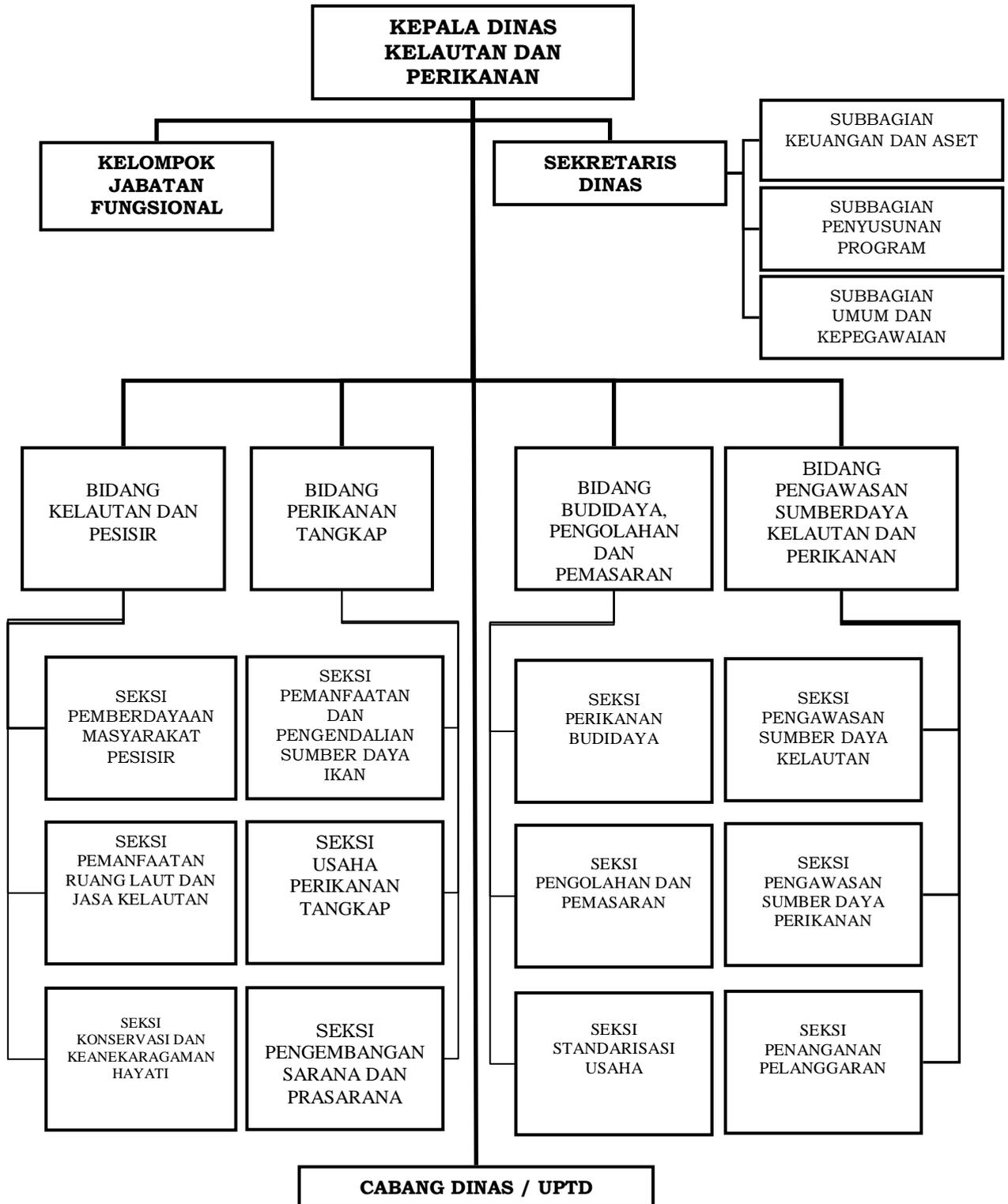
**5) Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Sejak tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat UPT yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah;
2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah;
3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah; dan
4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah.

Seluruh Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas masuk dalam klasifikasi kelas A dan dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut :

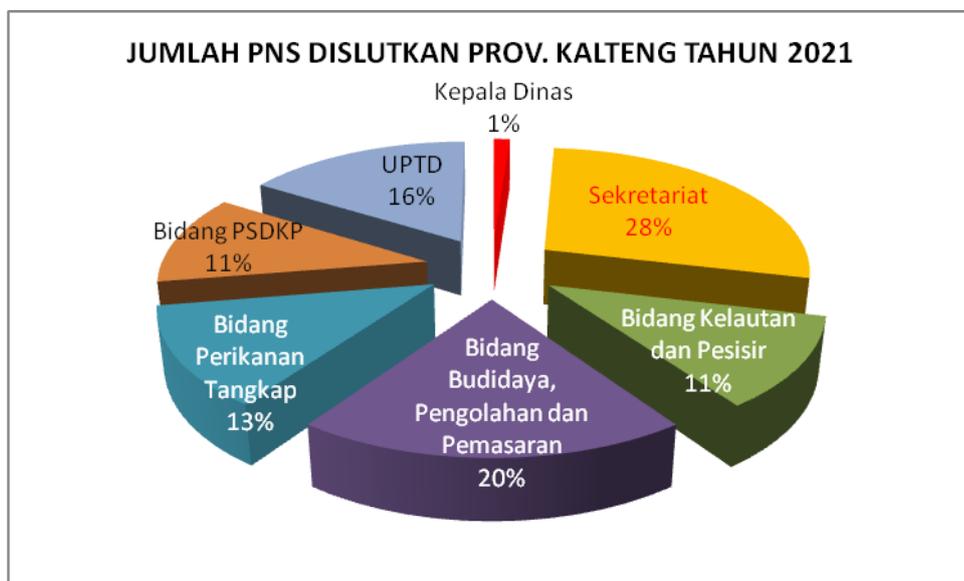


Gambar 1.1 *Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah*

### 1.5 Keadaan Personil dan Kepegawaian

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagai berikut :

- a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 mencapai 87 Orang dengan rincian sebagai berikut : Kepala Dinas 1 Orang; Sekretariat 24 Orang; Bidang Kelautan dan Pesisir 10 Orang; Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran 17 Orang; Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 10 Orang; Bidang Perikanan Tangkap 11 Orang; dan UPTD 14 Orang.



Gambar 1.2 Diagram Komposisi PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah

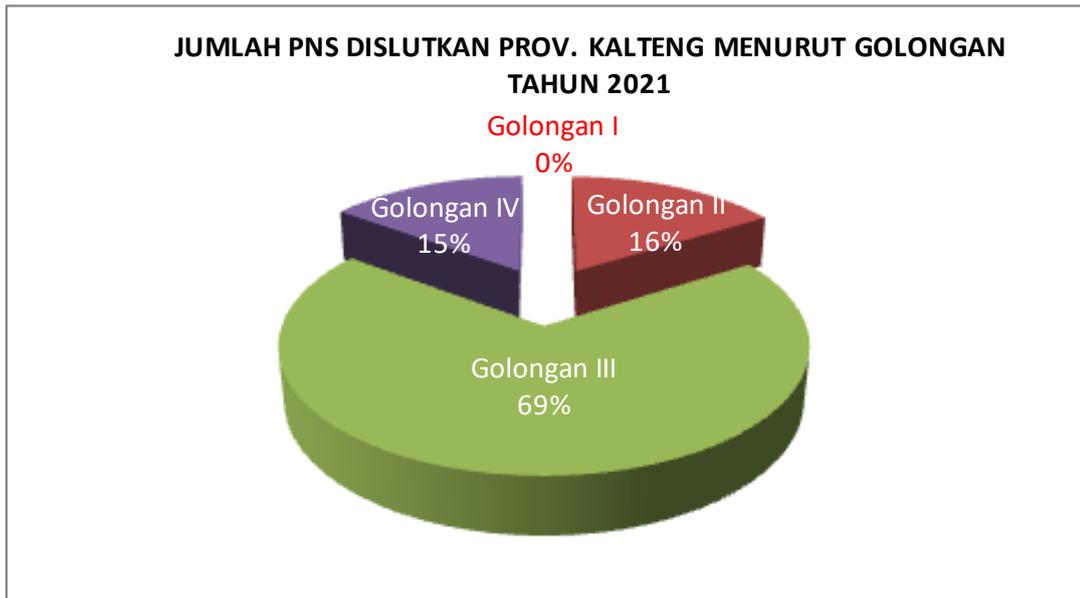
- b) Jika dilihat dari Gambar 1.2 di atas, jumlah PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak terdapat di Sekretariat sekitar 28 % dari total jumlah pegawai Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah.
- c) Jumlah PNS yang ada di kantor dinas sebanyak 84% sedangkan yang ada di UPTD sebanyak 16%.
- d) Jumlah PNS menurut golongan : Golongan IV sebanyak 13 Orang, Golongan III sebanyak 59 Orang, dan Golongan II sebanyak 14 Orang. Secara rinci, komposisi pegawai PNS dinas berdasarkan golongan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 *Komposisi Pegawai PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan*

No	Pangkat dan Golongan		Jumlah		Total	Ket
			L	P		
1	I/d	Juru Muda	0	0	0	
<b>Jumlah Golongan I</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	II/a	Pengatur Muda	0	0	0	
3	II/b	Pengatur Muda Tk. I	2	0	2	
4	II/c	Pengatur	4	0	4	
5	II/d	Pengatur Tk. I	5	3	8	
<b>Jumlah Golongan II</b>			<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	
6	III/a	Penata Muda	1	0	1	
7	III/b	Penata Muda Tk.I	5	7	12	
8	III/c	Penata	18	11	29	
9	III/d	Penata Tk. I	10	8	18	
<b>Jumlah Golongan III</b>			<b>34</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	
10	IV/a	Pembina	3	4	7	
11	IV/b	Pembina Tk. I	2	3	5	
12	IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	1	
13	IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0	
<b>Jumlah Golongan IV</b>			<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	
<b>Jumlah</b>			<b>51</b>	<b>36</b>	<b>87</b>	

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2021

- e) Dilihat pada tabel di atas menurut golongannya PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak pada Golongan III yaitu sebesar 69%, sedangkan jumlah terkecil pada Golongan IV sebesar 15%, dan kemudian Golongan II sebesar 16%. Komposisi ini disajikan pada Diagram berikut.



Gambar 1.3 Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Golongan

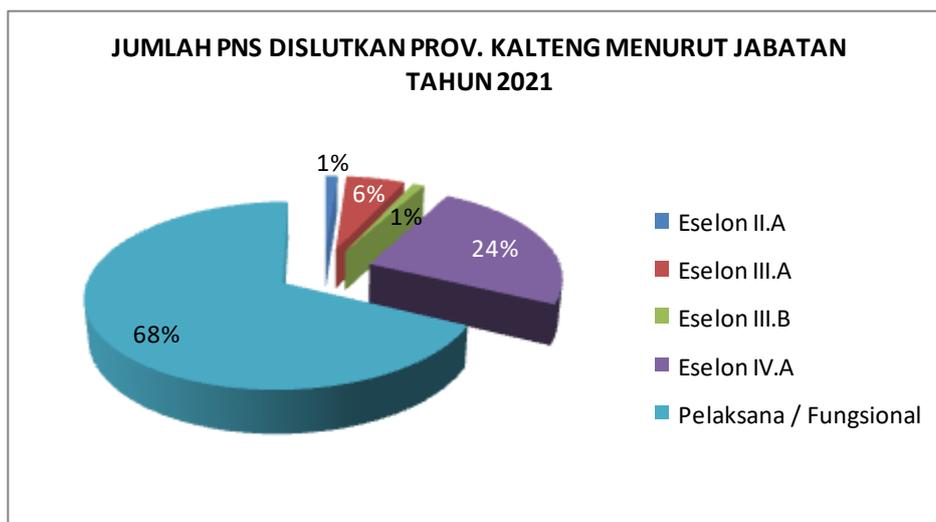
- f) Jumlah PNS Dislutkan Prov. Kalteng yang menduduki jabatan yaitu Eselon II sebanyak 1 Orang, jabatan Eselon III sebanyak 6 Orang, jabatan Eselon IV sebanyak 21 Orang, dan Pelaksana sebanyak 59 Orang yang terdiri dari 51 orang JFU dan 8 orang JFT.

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II.A	1	0	1
2	Eselon III.A	2	3	5
3	Eselon III.B	0	1	1
4	Eselon IV.A	13	8	21
5	Pelaksana	31	20	51
6	Non Struktural / Fungsional	4	4	8
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>36</b>	<b>87</b>

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2021

- g) Dilihat pada tabel di atas berdasarkan jabatannya PNS DKP Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak pada Golongan III yaitu sebesar 68%, sedangkan jumlah terkecil pada Golongan IV sebesar 17%, dan kemudian Golongan II sebesar 15%. Komposisi ini disajikan pada Diagram berikut.



Gambar 1.4 Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Jabatan

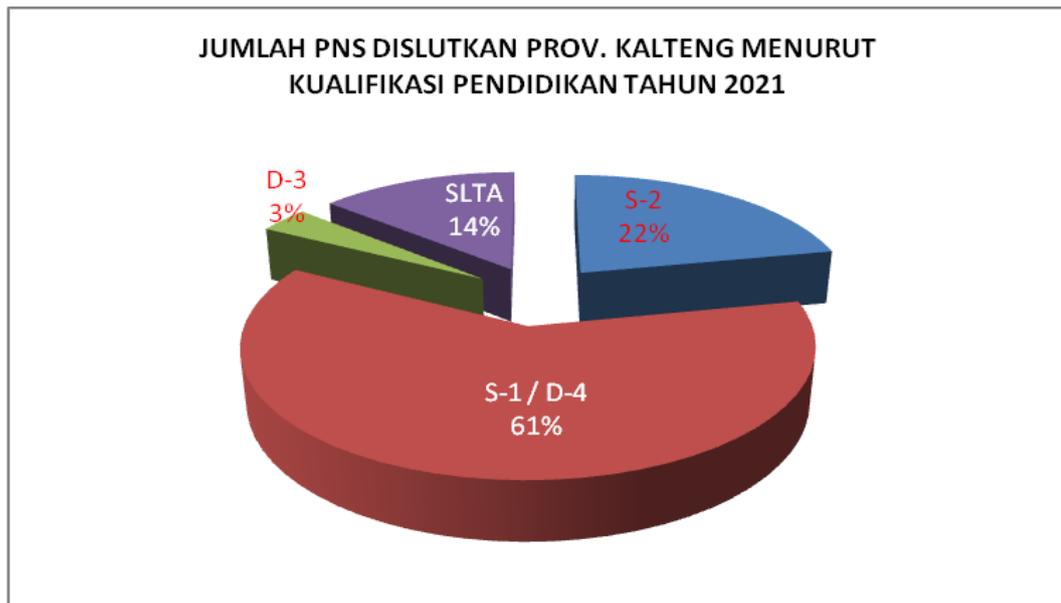
- h) Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan : S2 sebanyak 23 Orang, S1/D4 sebanyak 52 Orang, D3 sebanyak 4 Orang, dan SLTA/Sederajat sebanyak 14 Orang.

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total
		L	P	
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0	0	0
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	9	3	12
3	Diploma Satu (D-1)	0	0	0
4	Diploma Tiga (D-3)	2	1	3
5	Sarjana (S-1)/ Diploma Empat (D-4)	33	20	53
6	Sarjana (S-2)	7	12	19
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>87</b>

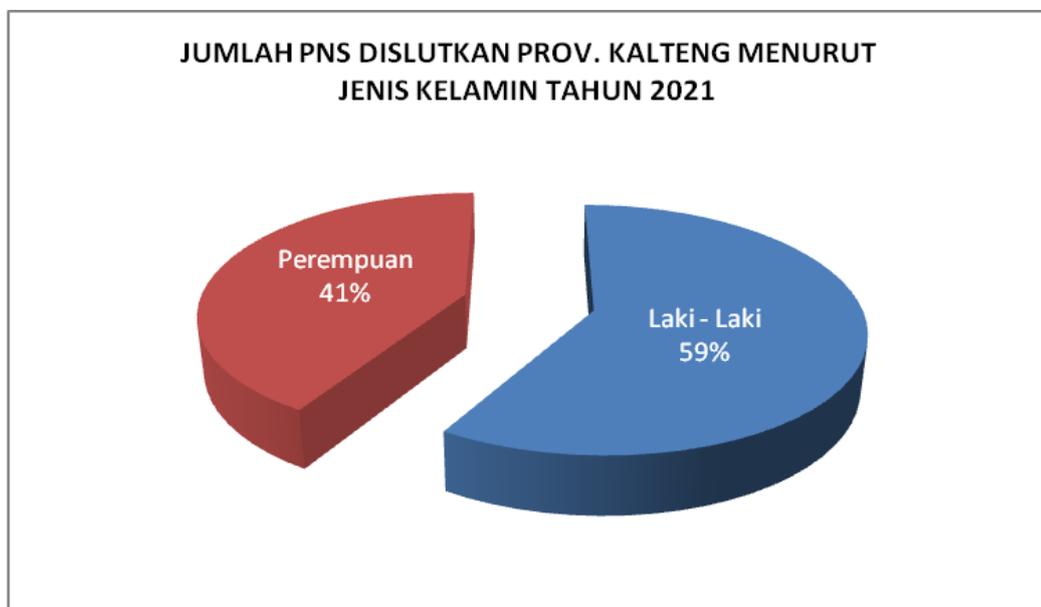
Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2021

- i) Menurut tingkat pendidikannya, PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak dengan tingkat pendidikan S1/ D4 mencapai 56%, diikuti dengan tingkat pendidikan S-2 sebesar 25% dan SLTA sebesar 15%. Sedangkan yang berlatar belakang pendidikan D3 yang paling sedikit yaitu 4%. Komposisi ini dapat dilihat pada Diagram berikut.



Gambar 1.5 Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Kualifikasi Pendidikan

- j) Menurut jenis kelamin, PNS Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 51 orang atau 59% berjenis kelamin laki-laki, sedangkan PNS perempuan sebanyak 36 orang atau 41%. Komposisi ini dapat dilihat pada Diagram berikut.



Gambar 1.6 Diagram Komposisi PNS Dislutkan Prov. Kalteng Menurut Jenis Kelamin

## **1.6 Sistematika Penyajian LKIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2021. Capaian Kinerja Tahun 2021 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 sehingga hasilnya akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu satu tahun.

Adapun sistematika penyajian LKIP sebagai berikut :

- a) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi latar belakang; maksud dan tujuan; kedudukan, tugas pokok dan fungsi; susunan struktur organisasi; dan keadaan personil dan kepegawain;
- c) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
- d) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
- e) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja; dan
- f) **Lampiran**, pada lampiran disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan lain-lain yang dianggap perlu.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. Pada Tahun 2021 ini kegiatan-kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sudah menggunakan acuan berdasarkan visi misi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021.

Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2016-2021 adalah : **“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**.

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud yang telah ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- Misi Kesatu** : **Pemantapan tata ruang wilayah provinsi.** Misi ini bertujuan Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas dengan sasaran terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
- Misi Kedua** : **Percepatan pembangunan infrastruktur.** Misi ini bertujuan Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan sasaran untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Ketiga** : **Pengelolaan sumberdaya air, pesisir dan pantai.** Misi ini bertujuan meningkatkan pembangunan di daerah pesisir dan pantai dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan nelayan di daerah pesisir Kalimantan Tengah.
- Misi Keempat** : **Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.** Misi ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran untuk meningkatkan

pemerataan dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat Kalimantan Tengah.

**Misi Kelima : Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, adil dan anti korupsi.** Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan di provinsi Kalimantan Tengah.

**Misi Keenam : Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan peran sektor pariwisata di provinsi Kalimantan Tengah.

**Misi Ketujuh : Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Tengah baik lingkungan kawasan hutan, perairan serta sumberdaya alam lainnya yang tidak terbarukan.

**Misi Kedelapan : Pengelolaan Pendapatan Daerah.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan pembagian kewenangan prioritas pembangunan daerah melalui sektor yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan dihubungkan secara langsung kepada **Misi Ketiga** yaitu **Pengelolaan Sumberdaya Air, Pesisir dan Pantai** yang dalam RPJMD dijelaskan bahwa terkait potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah berupa garis pantai sepanjang 750 km yang menghadap ke laut Jawa dan terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten, yakni: Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas, dan tempat bagi para nelayan untuk mencari penghidupan, maka sumber daya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan.

## **2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021**

### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan

bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2021.

Dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD, terdapat 5 (lima) tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : jumlah produksi perikanan tangkap (indikator : produksi perikanan tangkap dalam ton/tahun);
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi benih (indikator : produksi perikanan budidaya dalam ton/tahun dan produksi benih dalam ekor/tahun);
3. Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan. Tujuan tersebut di capai dengan sasaran: angka konsumsi ikan (indikator : konsumsi ikan masyarakat Kg/Kapita/tahun);
4. Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : Dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, jumlah luasan konservasi perairan dan jumlah luasan rehabilitasi kawasan (indikator : dokumen, luasan konservasi perairan dalam ha/tahun dan luasan rehabilitasi kawasan pesisir ha/tahun); dan
5. Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : Kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan dan UU yang berlaku dan POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (indikator : persentase dan jumlah POKMASWAS).

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) program utama yang telah ditetapkan dengan berbagai kegiatannya masing-masing yang tercantum di dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2021, antara lain meliputi :

- a. Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi perikanan tangkap (ton), target 130.526,10;
- b. Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi perikanan budidaya (ton), target 119.876,05;

- c. Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya, dengan indikator sasaran kinerja Jumlah produksi benih (ekor), target 70.335.000;
- d. Tercapainya Angka Konsumsi Ikan; dengan indikator sasaran kinerja Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun), target 49,63;
- e. Terlaksananya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) yang optimal; dengan indikator sasaran kinerja Jumlah luasan konservasi perairan (Ha), target 61.362,24;
- f. Terlaksananya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP yang optimal; dengan indikator sasaran kinerja Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha), target 2,50;
- g. Terlaksananya pengawasan pemanfaatan SDKP; dengan indikator sasaran kinerja Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%), target 87,00; dan
- h. Terlaksananya pengawasan pemanfaatan SDKP; dengan indikator sasaran kinerja Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok), target 40.

## **2.1.2 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

### **A. Strategi**

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan adalah :

- a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan budidaya;
- b. Melakukan peningkatan dan pengembangan usaha perikanan tangkap yang berbasis pada pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab;
- c. Meningkatkan daya saing produk hasil kelautan perikanan;
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat.

### **B. Kebijakan**

Kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah adalah :

- a. Mengembangkan dan memperkuat usaha perikanan budidaya yang berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan serta berwawasan lingkungan;
- b. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari, dan berbasis ekonomi kerakyatan;

- c. Mengembangkan dan memperkokoh sentra-sentra pengolahan serta pemasaran hasil;
- d. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanggulangan *illegal fishing*;
- e. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan kawasan pesisir.

### **2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai ukuran keberhasilan, tertuang pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 *IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)
		Jumlah produksi benih (ekor)
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)
4	Terlaksananya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP yang optimal	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)
		Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)
5	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan SDKP	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)

*Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2016-2021*

## **2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kinerja Tahunan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun. Untuk tahun 2020, rencana kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	130.526,10
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	119.876,05
		Jumlah produksi benih (ekor)	70.335.000,00
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	49,63
4	Terlaksananya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP yang optimal	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	61.362,24
		Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50
5	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan SDKP	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	87,00
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	40,00

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2016-2021

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja utama (IKU) yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disepakati. Penetapan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 diimplementasikan ke dalam 5 (lima) program, sebagai berikut :

### **(1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil:
  - 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
  - 2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:
  - 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- c. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:
  - 1) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai Dengan 10 GT.
- d. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi:
  - 1) Penyediaan sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.
  - 2) Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2021 sebesar Rp.9.791.900.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.9.229.931.875,-, atau terdapat penurunan sebesar Rp.561.968.125,-.

### **(2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Tujuan program ini adalah meningkatnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, nilai tambah produk perikanan, investasi, serta distribusi dan akses pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan volume dan nilai ekspor hasil perikanan serta peningkatan volume produk olahan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar:
  - 1) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran. Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2021 sebesar Rp.83.000.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.33.836.000,-, atau terdapat penurunan sebesar Rp.49.164.000,-.

### **(3) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan perairan umum daratan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi:
  - 1) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.
- b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi:
  - 1) Penetapan persyaratan dan Prosedur penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
  - 1) Pemberian Pendampingan, kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Kelautan dan Pesisir dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2021 sebesar Rp774.170.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.695.897.700,-, atau terdapat penurunan sebesar Rp.78.272.300,-.

### **(4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sasaran wilayah perairan bebas *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil:
  - 1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut sampai dengan 12 Mil.
  - 2) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.

- 3) Penumbuhan dan pengembangan kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2021 sebesar Rp.1.222.000.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi sebesar Rp.1.132.037.600,- atau terdapat penurunan anggaran sebesar Rp.89.962.400,-.

#### **(5) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri dan ekspor, serta menyerap tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut;
- 1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut.
  - 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
  - 3) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
  - 4) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Penanggung jawab program tersebut adalah Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2021 sebesar Rp.3.410.930.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.3.241.386.400,- atau terdapat penurunan anggaran sebesar Rp.169.543.600,-.

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang telah disepakati dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 *Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021*

<b>No.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	130.526,10
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	119.876,05
		Jumlah produksi benih (ekor)	70.335.000
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	49,63
4	Terlaksananya pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP yang optimal	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	61.362,24
		Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50
5	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan SDKP	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	87,00
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	40,00

*Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2016-2021*

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2021		KETERANGAN
		SEBELUM (Rp.)	SESUDAH (Rp.)	
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	9.791.900.000	9.229.931.875	Perubahan Anggaran
2.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	83.000.000	33.836.000	Perubahan Anggaran
3.	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	774.170.000	695.897.700	Perubahan Anggaran
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.222.000.000	1.132.037.600	Perubahan Anggaran
5.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.410.930.000	3.241.386.400	Perubahan Anggaran
<b>J U M L A H</b>		<b>15.282.000.000</b>	<b>14.333.089.575</b>	

*Sumber : DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan 2020*

Jumlah anggaran APBD untuk program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Tahun 2021 sebelum perubahan berjumlah Rp.15.282.000.000,- dan setelah perubahan anggaran berjumlah Rp.14.333.089.575,- atau terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.948.910.425,- atau 6,21%.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggung jawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Media pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan tahun 2021 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2021 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

##### **3.1.1 Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- ✓ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Realisasi}} \times 100\%$$

- ✓ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana Realisasi}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	>100	<b>Biru</b>
2.	Baik	80-100	<b>Hijau</b>
3.	Cukup	50-79	<b>Kuning</b>
4.	Kurang	<49	<b>Merah</b>

### **3.1.2 Hasil Pengukuran Kinerja**

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (*outcome*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 *Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	130.526,10	166.260,00*	127,38	Sangat Baik
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	119.876,05	121.970,84*	101,75	Sangat Baik
		Jumlah produksi benih (ekor)	70.335.000	70.850.000*	100,73	Sangat Baik
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	49,63	54,00*	108,81	Sangat Baik
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	61.362,24	61.362,24	100,00	Baik
		Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50	2,50	100,00	Baik
5	Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	87,00	87,00	100,00	Baik
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	40	53	132,50	Sangat Baik

Keterangan :

\* : merupakan angka sangat sementara yang diolah berdasarkan data dari kabupaten/kota (belum melakukan validasi semester II Tahun 2021).

### **3.2 Evaluasi Kinerja**

Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, kendala / masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran, yang mengandung 8 (delapan) indikator sasaran yang ingin dicapai di bidang kelautan dan perikanan pada Tahun 2021. Untuk mencapai 8 (delapan) indikator sasaran tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) program, dimana di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) kegiatan pokok dan 17 (tujuh belas) sub-kegiatan.

Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera pada tabel di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

## **SASARAN STRATEGIS 1 Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap**

### **3.2.1 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada pencapaian jumlah produksi perikanan tangkap. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 4 (empat) kegiatan pokok dan 6 (enam) sub-kegiatan. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.9.791.900.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.9.229.931.875,- dengan realisasi sebesar Rp.9.089.648.750,- atau 98,48%.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	130.526,10	166.260,00*	127,38	<b>Sangat Baik</b>

Keterangan :

\* : merupakan angka realisasi sangat sementara Tahun 2021 (belum validasi)

Dilihat dari tabel 3.2. di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada Tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan tangkap yang ditargetkan sebesar 130.526,10 ton, berhasil direalisasikan 166.260,00 ton atau 127,38%.

Apabila dibandingkan dengan capaian hasil tangkapan dari Tahun 2016-2020, maka terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi hasil tangkapan yakni sebesar 8,78 % per tahun seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2016 - 2020 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Kalimantan Tengah*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun
	2016	2017	2018	2019	2020	(%)
Jumlah Produksi Tangkap (Ton)	110.938,93	113.194,52	132.687,78	149.725,38	154.266,62	8,78

Pencapaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran-1** Tahun 2021 dinilai **SANGAT BAIK**. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi peningkatan produksi tangkap pada tahun 2021 menjadi 166.260,00 ton dari 154.266,62 ton atau meningkat sebesar 7,77%. Upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil; penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

Antara Sasaran RPJMD/Renstra Tahun 2021 dengan IKU Tahun 2021 haruslah saling mendukung dan sinergi sehingga dapat meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah. Pencapaian IKU ini pada Tahun 2021 memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat :

1. Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyerahkan pengelolaan ruang laut mulai 0 sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan provinsi. Sebagai akibat penerapan aturan ini, provinsi masih harus menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk pelimpahan kewenangan; personil, sarpras, dan wilayah kerja; salah satu diantaranya adalah keberadaan anggaran dan sumberdaya manusia yang difokuskan pada pelayanan kepada nelayan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Saat ini, kendala-kendala ini diupayakan agar dapat segera diatasi dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat nelayan.
2. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Satu Data atau dikenal dengan istilah *One Data*, yang mengharuskan setiap data yang dirilis dan digunakan pemerintah adalah data resmi yang dikeluarkan oleh KKP. Sampai dengan saat penyusunan LKIP ini, data tahun 2021 dimaksud belum bisa dipublikasikan sehingga data yang digunakan adalah data sementara berdasarkan hasil validasi data statistik tingkat nasional pada semester 1 yang lalu dan estimasi keseluruhan dari data semester 2 yang terkumpul dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dan belum di validasi secara nasional.

Selain beberapa faktor yang bersifat umum terkait upaya pencapaian IKU, terdapat faktor penghambat antara lain :

- (a) Lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap diperoleh dari data survei sampel desa perikanan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau tidak berfungsi selayaknya tempat pelelangan ikan. Kalau pun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak

permainan tengkulak. Dengan demikian, TPI yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi keakuratan dan akuntabilitas data;

- (b) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap, terutama armada penangkapan ikan di perairan laut sebagian besar masih berukuran < 5 GT sehingga trip penangkapan tidak terlalu lama dan luas jangkauan nelayan melaut tidak terlalu jauh. Selain itu, pelabuhan perikanan masih belum mampu menjadi sentra aktifitas nelayan, dikarenakan masih belum lengkapnya kebutuhan nelayan pada areal pelabuhan;
- (c) Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan rusaknya habitat ikan dan sumberdaya ikan semakin menurun karena eksploitasi berlebih terutama pada perairan umum daratan; dan
- (d) Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.
- (e) Terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia yang juga berimbas kepada nelayan di Kalimantan Tengah sehingga membatasi ruang gerak nelayan untuk dapat beraktivitas seperti biasa dalam melakukan penangkapan ikan.

Berdasarkan analisa terhadap beberapa permasalahan di atas, terdapat beberapa rekomendasi solusi yang jangka pendek dapat dilaksanakan :

- a. Optimalisasi fungsi pelabuhan-pelabuhan perikanan di Kalteng. Pelabuhan perikanan memegang peranan penting pada sektor perikanan tangkap di laut. Ketersediaan kebutuhan nelayan dan kewajiban pengurusan dokumen kapal dan berlayar pada pelabuhan perikanan akan memberikan kemudahan pelayanan terhadap nelayan. Jika hal ini dimaksimalkan, maka penerapan kebijakan pemerintah, data base penangkapan, dan pengelolaan perikanan tangkap laut dapat dilaksanakan melalui fungsi kepelabuhanan perikanan.
- b. Menggerakkan fungsi pengelolaan perijinan seirama dengan pengawasan, sehingga diharapkan masyarakat yang teridentifikasi kurang dalam perijinan dapat terlayani segera.
- c. Mengoptimalkan Petugas Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang ada di pelabuhan perikanan agar dapat melakukan pencatatan hasil tangkapan nelayan secara akurat dan tepat.

- d. Memberikan pelayanan konsultasi bagi nelayan melalui UPT yang ada di kabupaten secara online serta memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait kegiatan perikanan bagi pelaku usaha.

## **SASARAN STRATEGIS 2**

### **Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya**

#### **3.2.2 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada pencapaian jumlah produksi perikanan budidaya, khususnya daging ikan untuk dikonsumsi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 1 (satu) kegiatan pokok dan 4 (empat) sub-kegiatan, yaitu penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut, penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengelolaan perikanan budidaya.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 untuk mewujudkan sasaran tersebut sebesar Rp.3.410.930.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.3.241.386.400,- dengan realisasi sebesar Rp.2.780.479.650,- atau 86,00%.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	119.876,05	121.970,84*	101,75	<b>Sangat Baik</b>

Keterangan :

\* : merupakan angka realisasi sangat sementara Tahun 2021 (belum validasi)

Dilihat dari Tabel 3.4 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada Tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan, kategori pencapaian adalah **SANGAT BAIK**. Produksi perikanan budidaya yang ditargetkan sebesar 119.876,05 ton mampu terealisasi 121.970,84 ton atau sebesar 101,75%.

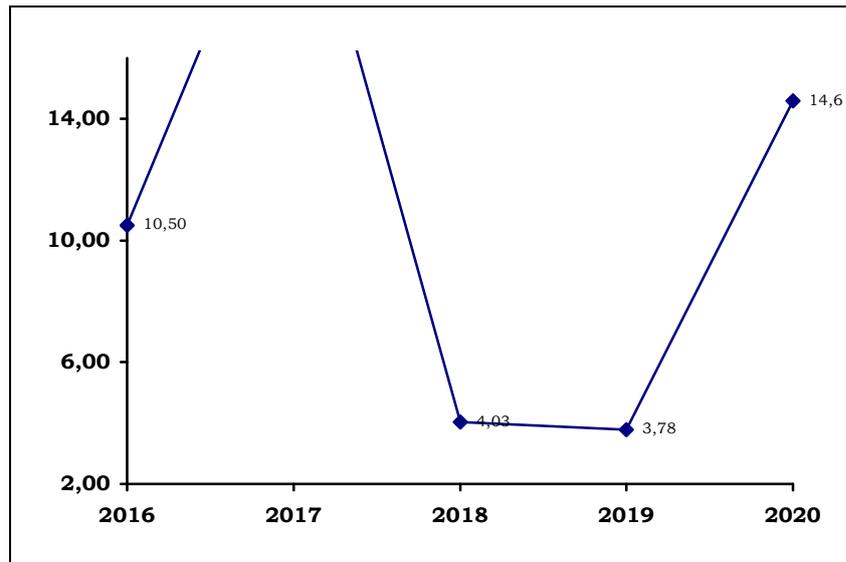
Apabila capaian produksi perikanan budidaya tahun 2021 ini dibandingkan dengan capaian produksi perikanan budidaya Tahun 2020 sebesar 116.729,40 ton dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan produksi sebesar 14,60%. Begitu pula bila dilihat dari segi kategori capaian kinerja, tahun 2021 mampu melebihi target capaian kinerja dan memperoleh kategori Sangat Baik.

Berdasarkan data tahunan statistik, sejak Tahun 2016-2020 terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 11,53%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2016 - 2020 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ton)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun
	2016	2017	2018	2019	2020	(%)
Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	76.275,75	94.346,27	98.151,74	101.857,32	116.729,40	11,53

Namun, apabila dilakukan analisa kenaikan produksi setiap tahunnya, puncak kenaikan produksi ada di Tahun 2020, yaitu kenaikan sebesar 14,60% dibandingkan dari Tahun 2019. Secara grafis, trend pergerakan kenaikan/penurunan produksi perikanan budidaya dari Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1 *Grafik Trend / Kecenderungan Produksi Perikanan Budidaya di Kalteng sejak Tahun 2016-2020*

Kondisi ini memerlukan analisa lebih lanjut untuk ditentukan permasalahannya, namun kondisi perikanan budidaya di Kalimantan Tengah yang masih menggunakan metode ekstensifikasi dan minim intensifikasi dengan penerapan teknologi terbaru diperkirakan menjadi salah satu alasan peningkatan produksi tidak berjalan naik secara linier.

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian secara maksimal pada indikator kinerja ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
- b. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
- c. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan

- d. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS);
- e. Terjadinya pandemic covid-19 selama dua tahun terakhir juga secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas pembudidaya dalam melakukan budidaya ikan karena adanya pembatasan kegiatan.

Dari permasalahan tersebut di atas, rekomendasi yang dapat secara cepat diaplikasikan dalam rangka peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya, antara lain :

- a. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui *pilot project* kelompok binaan pembudidaya handal;
- b. Pengadaan kolam sistem Bioflok Lengkap (terpasang);
- c. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui bantuan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya;
- d. Pemberian bantuan benih ikan kepada kelompok pembudidaya ikan dan lembaga keagamaan sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan benih bermutu sehingga mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, antara lain benih ikan Betok dan ikan Jelawat;
- e. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR; dan
- f. Jalinan intensif kerjasama pemerintah daerah dan sektor permodalan untuk mampu memberikan pendanaan kredit lunak kepada pembudidaya potensial di Kalteng, salah satunya dengan melibatkan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki tugas utama menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir yang berdampingan kepada pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan. Melalui BLU-LPMUKP KKP ini, pada tahun 2021 telah disalurkan pinjaman/pembiayaan BLU-LPMUKP yang diserahkan secara simbolis oleh

Gubernur Kalimantan Tengah kepada 8 (delapan) pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai perwakilan dari pelaku usaha kelautan dan perikanan Kalteng, yang berasal dari Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kapuas sebanyak 5 pelaku usaha, serta Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Seruyan sebanyak 3 pelaku usaha.

### 3.2.3 Indikator Kinerja Jumlah Produksi Benih

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah benih ikan yang mampu dihasilkan selama jangka waktu satu tahun di Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan 1 (satu) kegiatan pokok dan 4 (empat) sub-kegiatan.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Benih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021*

No.	SASARAN RPJMD/RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi benih (ekor)	70.335.000	70.850.000*	100,73	<b>Sangat Baik</b>

Keterangan :

\* : merupakan angka realisasi sangat sementara Tahun 2021 (belum validasi)

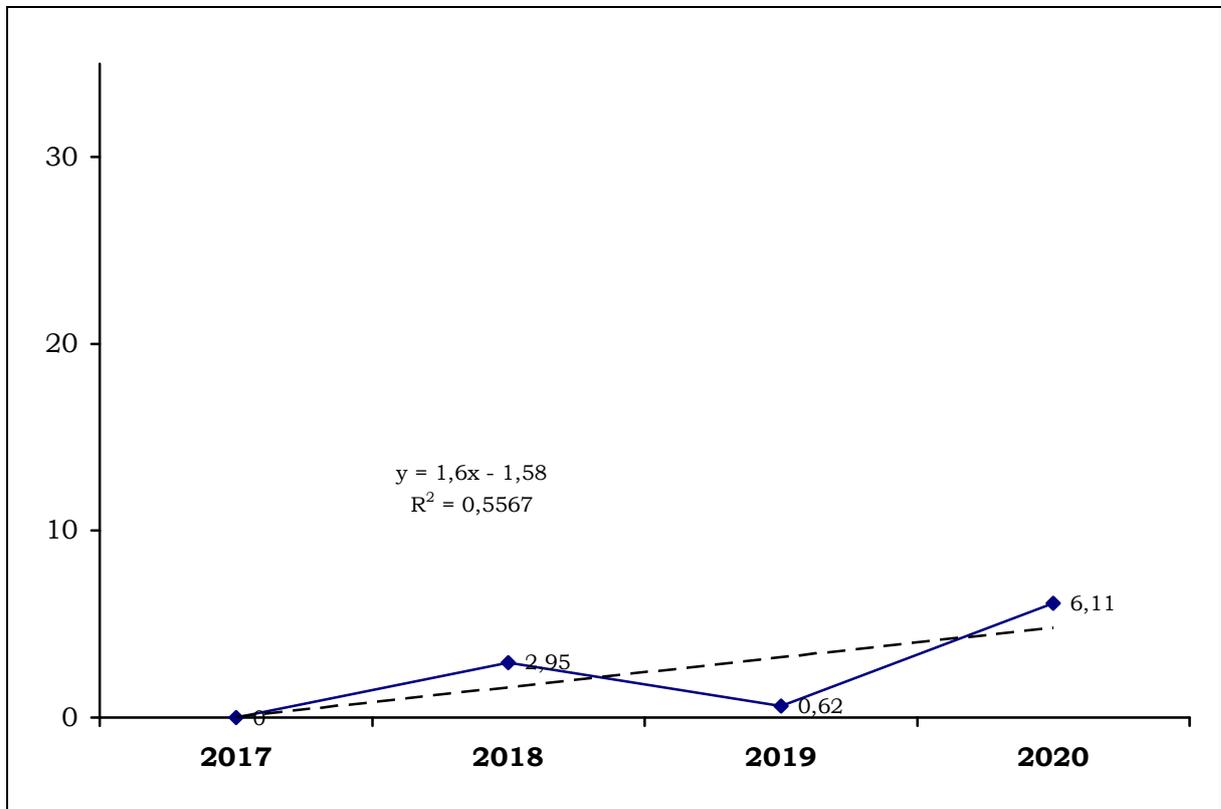
Dilihat dari Tabel 3.6 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pada Tahun 2021 telah melampaui capaian yang telah ditetapkan atau mencapai kategori **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan data tahunan statistik, sejak Tahun 2016-2020 terjadi kenaikan rata-rata jumlah produksi benih perikanan budidaya sebesar 2,42%.

Tabel 3.7 *Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2016 - 2020 pada Indikator Kinerja Jumlah Produksi Benih di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (Ekor)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Produksi Benih	60.180.000	60.180.000	61.956.000	62.342.000	66.154.000	2,42

Secara *trend* / kecenderungan produksi benih ikan di Kalimantan Tengah berdasarkan data di atas menunjukkan peningkatan walaupun masih sangat kecil. Peningkatan dimaksud disajikan pada gambar grafik berikut ini.



Gambar 3.2 Grafik Trend / Kecenderungan Produksi Benih Ikan di Kalteng sejak Tahun 2016-2020

Peningkatan capaian kinerja pada indikator Jumlah Produksi Benih di Provinsi Kalimantan Tengah ini dimulai sejak tahun 2013 dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya sampai pada tahun 2018 sebesar 61.956.000 ekor benih. Pada tahun 2019, produksi benih ikan mencapai 62.342.000 ekor dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,62%. Hal ini dikarenakan adanya kemarau panjang yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan sehingga mempengaruhi kondisi perairan dan kondisi indukan yang digunakan. Dengan adanya kondisi tersebut maka benih ikan yang dihasilkan tidak maksimal dan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan produksi benih dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 6,11%.

Apabila dianalisa hubungan produksi benih terhadap produksi perikanan budidaya, terdapat hubungan yang cukup erat, mengingat salah satu faktor penentu keberhasilan produksi perikanan budidaya adalah ketersediaan benih dari

hasil produksi lokal Kalimantan Tengah. Jika kebutuhan benih di lokal Kalteng mencukupi, maka ketergantungan terhadap benih yang berasal dari luar Kalteng akan menurun, begitu pula logika sebaliknya. UPT pemerintah dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada sekarang ini dalam memenuhi permintaan pasar dalam daerah secara tidak langsung mempengaruhi keberhasilan produksi perikanan budidaya secara umum.

Hal inipun didukung dengan adanya ketersediaan benih yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan didukung dengan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya IKan yang Baik).

Secara umum, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian secara maksimal dalam pencapaian kinerja produksi perikanan budidaya, yaitu :

- a. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut;
- b. Belum tersedianya pabrik pakan atau gudang pakan skala besar di wilayah Kalteng. Hal ini berakibat pada tingginya harga pakan ikan, yang kemudian mengakibatkan biaya produksi tinggi, dan berdampak pada tidak mampunya bersaing harga ikan pembudidaya Kalteng dengan ikan yang berasal dari luar Kalteng;
- c. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi; dan
- d. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS);
- e. Terjadinya pandemic covid-19 selama dua tahun terakhir juga secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas pembudidaya dalam melakukan budidaya ikan karena adanya pembatasan kegiatan.

Namun poin penting dan penekanan utama pada usaha rekomendasi terhadap kendala pencapaian kinerja ini adalah poin “c”, yaitu “Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenih yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi”.

Memperhatikan berbagai bahasan di atas, rekomendasi yang dapat secara cepat diaplikasikan dalam rangka peningkatan jumlah produksi benih perikanan budidaya, antara lain :

- a. Optimalisasi fungsi UPT perbenihan yang dimiliki pemerintah daerah (baik kabupaten/ kota), melalui peningkatan kompetensi SDM yang ada ada, peningkatan keberadaan sarpras pendukung, dan juga kemampuan alih teknologi melalui pembinaan kepada UPR yang berada di sekitar dan menjadi wilayah kerjanya.
- b. Dinas dapat melakukan kerjasama dengan provinsi tetangga/ daerah lainnya yang teridentifikasi sebagai penyuplai benih ke Kalteng, dalam rangka menjamin kualitas dan kuantitas benih yang masuk ke Kalteng. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka menyaring benih yang masuk sembari menyiapkan kemampuan dalam daerah dalam menyediakan benih. Kerja sama ini telah dilakukan bersama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin Kalimantan Selatan.
- c. Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR;
- d. Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba yang disertai dengan penerapan teknologi terbaru yang memungkinkan intensifikasi budidaya perikanan atau melalui *pilot project* kelompok binaan pembudidaya handal;
- e. Meningkatkan upaya penyediaan pakan kepada pembudidaya ikan melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya yang sudah diidentifikasi mampu menjadi contoh bagi pembudidaya lainnya; dan
- f. Jalinan intensif kerjasama pemerintah daerah dan sektor permodalan untuk mampu memberikan pendanaan kredit lunak kepada pembudidaya potensial di Kalteng.

## **SASARAN STRATEGIS 3**

### **Tercapainya Angka Konsumsi Ikan (AKI)**

#### **3.2.4 Angka Konsumsi Ikan (AKI)**

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan 1 (satu) kegiatan pokok dan 1 (satu) sub-kegiatan, yaitu pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah besar dalam rangka pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar.

Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Tahun Anggaran 2021 untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp.83.000.000,-. Setelah perubahan anggaran, pagu program dimaksud menjadi Rp.33.836.000,- dengan realisasi sebesar Rp.31.988.000,- atau 94,54%.

Capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	49,63	54,00*	108,81	<b>Sangat Baik</b>

Keterangan :

\* : merupakan angka realisasi sangat sementara Tahun 2021 (belum validasi)

Dilihat pada Tabel 3.8, pada Tahun 2021 capaian sasaran peningkatan angka konsumsi ikan masyarakat Kalteng adalah 54,00 kg/kapita/tahun atau mencapai 108,81% dari target yang direncanakan. Capaian kinerja ini dinilai dan mencapai kategori **SANGAT BAIK**. Angka capaian ini merupakan angka realisasi sementara dari target yang telah ditetapkan karena untuk perhitungan Angka Konsumsi Ikan ini dilakukan setiap satu tahun sekali setelah tahun berjalan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, pergerakan AKI Kalteng dan Nasional disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9 *Perbandingan Pergerakan Nilai AKI Kalteng dan Nasional dari Tahun 2016 - 2020 pada Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021*

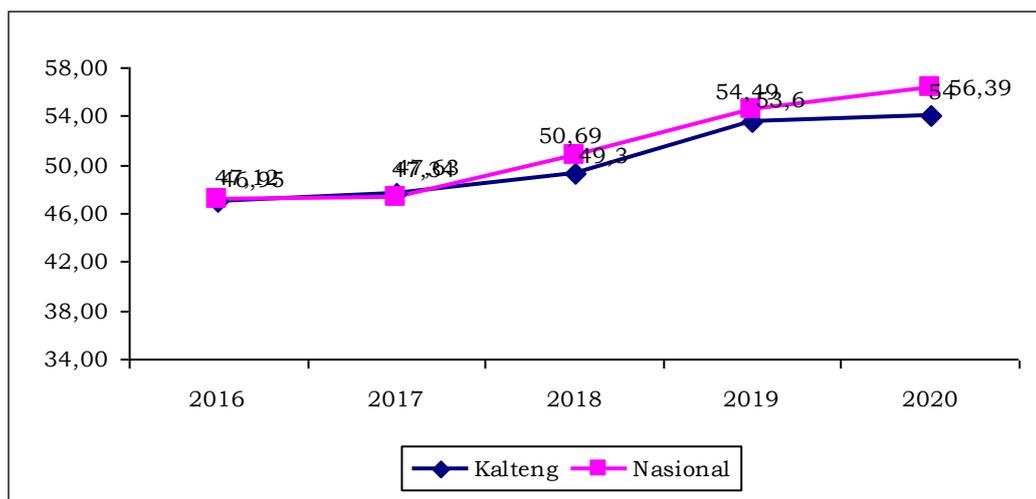
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (kg/kapita/ tahun)					Kenaikan Rata-Rata per Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kalimantan Tengah	46,95	47,63	49,30	53,60	54,00	3,61
Nasional	47,12	47,34	50,69	54,49	56,39	4,63

Secara sekilas, AKI Kalteng rata-rata mengalami kenaikan per tahun sebesar 3,61%. Sedangkan secara nasional terjadi peningkatan AKI rata-rata sebesar 4,63% per tahun. Perhitungan AKI ini dilaksanakan setiap tahun setelah tahun berjalan secara nasional di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan menggunakan data hasil dari Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jadi untuk AKI tahun 2021 akan diperoleh angka tetapnya pada tahun 2022 setelah adanya perhitungan secara nasional.

Angka Konsumsi Ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Angka Konsumsi Ikan adalah penjumlahan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga dengan jumlah konsumsi diluar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat. Konsumsi ikan rumah tangga merupakan jumlah konsumsi ikan segar, ikan dalam awetan, ikan dalam makanan jadi dan ikan dalam bumbu-bumbuan. Konsumsi ikan diluar rumah tangga adalah jumlah konsumsi ikan dari hotel, restoran, dan catering. Sedangkan konsumsi ikan tidak tercatat adalah jumlah konsumsi ikan dari rumah sakit, lembaga pemasayarakatan, pondok pesantren dan panti asuhan.

Angka konsumsi ikan perkapita pertahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri untuk dikonsumsi masyarakat. AKI menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di masing-masing wilayah, untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di suatu daerah, selain itu untuk mengetahui besarnya kontribusi ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Program GEMARIKAN merupakan salah satu program pemerintah untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Grafik pergerakan AKI Kalteng dan AKI Nasional dimaksud disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.3 Grafik pergerakan AKI Kalteng dan AKI Nasional Tahun 2016-2020

Pergerakan kenaikan AKI Kalteng yang cenderung stabil dapat dianalisa sebagai akibat dari pergerakan angka produksi perikanan yang relatif stabil, baik itu pada sektor perikanan tangkap maupun sektor perikanan budidaya. Sedangkan dari sisi produksi hasil tangkapan ikan di laut, fakta di lapangan menunjukkan sebagian produksi dimaksud diangkut untuk diperdagangkan ke luar provinsi, sehingga tidak menjadi konsumsi lokal Kalteng. Satu hal yang cukup mempengaruhi mengapa AKI Kalteng cukup tinggi adalah kebiasaan dan budaya makan ikan masyarakat Kalteng yang sudah turun temurun begitu dekat dengan aliran sungai yang menghasilkan sumber kehidupan bagi masyarakat Suku Dayak, termasuk diantaranya adalah mengonsumsi ikan.

Memperhatikan kondisi yang ada, terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan kendala dalam meningkatkan pencapaian sasaran indikator kinerja ini, antara lain :

- a. Ragam produk olahan hasil perikanan yang harus dikembangkan terus agar mampu bersaing dengan produk olahan pangan lainnya, yang diharapkan dapat dipasarkan ke luar daerah bahkan mampu di ekspor ke luar negeri;
- b. Produk hasil perikanan yang cenderung mudah rusak sehingga menyebabkan nilai ekonomisnya menurun dan isu penggunaan bahan kimia berbahaya terhadap produk hasil perikanan menyebabkan daya beli masyarakat menurun terhadap produk olahan tertentu;
- c. Skala produksi olahan hasil perikanan di Kalimantan Tengah masih di skala industri rumah tangga sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah.

Pencapaian kinerja **Sasaran Strategis-3** Tahun 2021 dinilai **Sangat Baik**, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran sehingga pada tahun 2021 telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 13 SKP, yaitu 5 (lima) SKP diterbitkan untuk UPI di Kota Palangka Raya dan 8 (delapan) SKP diterbitkan untuk UPI di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebanyak 13 (tiga belas) SKP tersebut terdiri dari :

1. Produk Abon Ikan Lembaran pada UPI Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS) Kota Palangka Raya.
2. Produk Kue Kering Akar Pinang Patin pada UPI Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS) Kota Palangka Raya.
3. Produk Keripik Kulit Ikan pada UPI Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS) Kota Palangka Raya.
4. Produk Mie Ikan Mix Sayuran pada UPI Pramesti Malima Energi Fokus Sejahtera (PMEFS) Kota Palangka Raya.
5. Produk Keripik Seluang pada UPI Tampung Parei Kota Palangka Raya.
6. Produk Amplang Ikan pada UPI Mase Uleng Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Produk Stik Ikan pada UPI Mase Uleng Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Produk Amplang Ikan pada UPI Poklahsar Sari Rasa Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Produk Kerupuk Ikan pada UPI Poklahsar Sari Rasa Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Produk Stik Ikan pada UPI Poklahsar Sari Rasa Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Produk Udang Kering pada UPI PT. Lautan Pilar Perkasa Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Produk Kerupuk Ikan, Kerupuk Udang pada UPI Rusdiana Kabupaten Kotawaringin Barat.
13. Produk Amplang Ikan pada UPI Rusdiana Kabupaten Kotawaringin Barat.

Oleh karena itu untuk kedepannya, diperlukan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target tahun yang akan datang antara lain :

- a. Peningkatan produksi di sektor perikanan penangkapan dan budidaya untuk meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi segar maupun sebagai bahan baku pengolahan ikan;

- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung proses arus barang dan jasa agar dapat lancar dari kota ke desa maupun sebaliknya;
- c. Peningkatan Nilai Tambah Produk olahan perikanan di tingkat UMKM sehingga meningkatnya minat konsumen dalam mengkonsumsi ikan;
- d. Pemberian bantuan penguatan fasilitas permodalan ke UMKM sektor Kelautan dan Perikanan;
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang ada di UMKM;
- f. Peningkatan promosi, peluang investasi dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan.

**SASARAN STRATEGIS 4**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan,**  
**Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya**  
**Kelautan dan Perikanan (SDKP)**

**3.2.5 Indikator Kinerja Jumlah Luasan Konservasi Perairan**

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah luasan perairan yang dijadikan kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diperkuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Luasan kawasan konservasi perairan dimaksud dinyatakan dalam satuan luasan Hektare/ Ha.

Untuk mewujudkan **IKU-1** pada **Sasaran-4** ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan 3 (tiga) Kegiatan Pokok dan 3 (tiga) sub-kegiatan, yaitu pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi dalam rangka penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi, dan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Capaian kinerja Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Luasan Konservasi Perairan Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	61.362,24	61.362,24	100,00	<b>Baik</b>

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian dari target luas perairan 61.362,24 Ha yang direncanakan untuk dibuat sebagai kawasan konservasi perairan, dapat terealisasi 61.362,24 Ha atau setara 100,00%, sehingga termasuk kategori Baik.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, provinsi diberikan amanat untuk mengelola perairan laut sejauh 0 – 12 mil laut, sehingga berdasarkan hal dimaksud hanya kawasan perairan laut saja yang dapat dikelola oleh provinsi. Sedangkan berdasarkan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kalteng, hanya terdapat ruang wilayah di kawasan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, dan perairan di sekitarnya yang direkomendasikan pola ruangnya untuk konservasi atau kawasan wisata perairan, dengan luasan 61.362,24 Ha. Luasan inilah yang termasuk dalam kawasan konservasi perairan.

Dari sisi pencapaian kinerja, luasan 61.362,24 Ha adalah wilayah perairan laut di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dipolaruangkan dalam RZWP3K Kalteng sebagai kawasan konservasi perairan/wisata perairan. Kebijakan sebagai kawasan konservasi perairan/wisata perairan dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/551/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Wisata Perairan Senggora Sepagar dan Laut Sekitarnya Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/543/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Taman Wisata Perairan Senggora Sepagar dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2038. Pada tahun 2019 ini, penetapan kawasan konservasi di Kalimantan Tengah ini sudah sampai pada tahapan penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/KEPMEN-KP/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong

Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target dan pengelolaan kawasan dimaksud secara baik, terdapat rekomendasi yang dapat dilaksanakan, yaitu :

- a. Menyiapkan sarpras pendukung pengelolaan kawasan, terutama dalam hal pengawasan dan pemantauan pemanfaatan kawasan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan perairan;
- b. Menyusun dan mengajukan aturan pengelolaan kawasan berbasis lestari (*sustainability*) kepada Gubernur Kalteng, supaya sebagai landasan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dimaksud.

### **3.2.6 Indikator Kinerja Jumlah Rehabilitasi Kawasan Pesisir**

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah luasan kawasan pesisir yang dilakukan upaya rehabilitasi. Secara umum, kawasan pesisir yang memiliki kerawanan kerusakan dan memerlukan upaya rehabilitasi telah dipetakan dalam RZWP3K Kalteng. Berdasarkan data yang ada tersebut, dilakukan upaya rehabilitasi, melalui mekanisme pendanaan APBD, APBN, maupun swadaya masyarakat.

Untuk mewujudkan **IKU-2** pada **Sasaran-4** ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan 3 (tiga) Kegiatan Pokok dan 3 (tiga) sub-kegiatan, yaitu pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi dalam rangka penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi, dan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Capaian kinerja Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP	Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50	2,50	100,00	<b>Baik</b>

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian dari target luasan 2,5 Ha kawasan pesisir yang rusak yang direncanakan untuk direhabilitasi, tercapai 2,5 Ha atau setara 100,00%. Target 2,5 Ha adalah harapan keberhasilan rehabilitasi kawasan pesisir, melalui rehabilitasi ekosistem maupun pemasangan sabuk pantai, setiap tahunnya, sehingga pada akhir periode RPJMD 2016-2021, diharapkan terdapat 12,5 Ha kawasan pesisir yang termasuk kategori mengalami kerusakan berhasil direhabilitasi.

Berdasarkan data RZWP3K Kalteng, terdapat 532,46 km panjang pantai di Kalteng yang memiliki Indeks Kerentanan Pantai (IKP) yang tinggi terhadap bencana abrasi. Angka dimaksud berarti sekitar 72,94% dari total panjang pantai Kalteng sangat rentan terhadap bencana abrasi. Hal ini berarti, akan sangat banyak wilayah pantai yang sangat mendesak untuk dilakukan rehabilitasi berdasarkan kebutuhan karakteristik masing-masing pantai dimaksud.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target luasan rehabilitasi kawasan pesisir dimaksud, terdapat rekomendasi sebagai berikut :

- a. Melakukan pemetaan terhadap kawasan pantai Kalteng yang terindikasi kerawan tinggi, beserta analisa kebutuhan rehabilitasi berdasarkan kondisi masing-masing wilayah dengan memperhatikan keterkaitan dampak antara masing-masing wilayah berdekatan;
- b. Mengusulkan upaya pengelolaan dan rehabilitasi kawasan pantai potensial melalui mekanisme pendanaan APBD maupun sumber lain di luar APBD provinsi, bahkan jika dimungkinkan melalui kerjasama pihak swasta atau masyarakat;
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir mengenai pentingnya upaya memelihara lingkungan pantai.

## **SASARAN STRATEGIS 5**

### **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)**

#### **3.2.7 Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Ketentuan/ Undang-Undang yang Berlaku**

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada persentase pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal berukuran sampai dengan 30 GT. Untuk mewujudkan **IKU-1** pada **Sasaran-5** ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dari 3 (tiga) sub-kegiatan dari 1 (satu) kegiatan pokok pada program tersebut, yang mendukung **IKU-1** pada **Sasaran-5** ini adalah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil, pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil, penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil.

Capaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran-5** Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
5	Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	87,00	87,00	100,00	<b>Baik</b>

Capaian kinerja **IKU-1** pada **Sasaran-5** ini dinilai BAIK karena persentase kepatuhan pelaku usaha mencapai kinerja sebesar 100,00%.

Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku dilihat dari aspek pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil telah

terpenuhi pemanfaatannya seluas 61.362,24 Ha atau telah mencapai keseluruhan target. Apabila dilihat dari aspek penangkapan sampai dengan 12 mil maka dapat dilihat dari hasil laporan operasi pengawasan di perairan selama tahun 2021 telah diperiksa 14 unit kapal penangkap ikan dan ditemukan 1 (satu) unit kapal pengguna lampara dasar sedang beroperasi menangkap ikan di kawasan Gosong Senggora yang merupakan kawasan konservasi kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan dan diproses penegakkan hukum oleh pihak Satpolair Polres Seruyan. Sedangkan apabila dilihat dari aspek penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Kalimantan Tengah telah terdapat 53 POKMASWAS yang aktif dalam melakukan pengawasan pada tahun 2021.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kepemilikan izin usaha perikanan tangkap, antara lain :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang berlaku;
- b. Aparat pelaksana atau penegak hukum yang dapat mengayomi dan mengarahkan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku;
- c. Kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk menaati peraturan yang berlaku;
- d. Sarana dan prasarana yang memadai sehingga proses perizinan tidak memakan waktu panjang;
- e. Dana yang memadai sesuai aturan yang berlaku dan tidak dirasa terlalu berat bagi pelaku usaha.

Dalam mewujudkan **IKU-1** pada **Sasaran-5** ini agar dapat berkelanjutan dan meningkat pada tahun berikutnya maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendataan kapal nelayan;
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pendampingan bagi pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha perikanan maupun yang belum.

### **3.2.8 Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Berperan Aktif Dalam Pengawasan Pemanfaatan SDKP**

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan **IKU-2** pada **Sasaran-5** ini dilakukan melalui Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Capaian kinerja IKU ini pada Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13 *Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Tengah*

No.	SASARAN RPJMD/ RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KATEGORI
				NILAI	%	
5	Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	40	53	132,50	<b>Sangat Baik</b>

Dilihat dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian kinerja **IKU-2** pada **Sasaran-5** ini melebihi target yang ditetapkan 40 kelompok dan tercapai sebesar 53 kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan atau sebesar 132,50%.

POKMASWAS berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat. Pengawasan, pemantauan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan ilegal yang berupa : penyetruman ikan, peracunan ikan (potas), penggunaan alat tangkap terlarang, budidaya/keramba yang terlalu banyak, dan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem perairan/danau. Untuk itu, melalui bantuan yang diberikan ini diharapkan agar peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan dapat terus ditingkatkan sehingga dapat terjalin kerjasama antara

masyarakat dan pemerintah untuk menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan-kegiatan ilegal.

Salah satu upaya mengurangi pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS). Sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS) bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dan menurunkannya tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk ekosistem danau dan perairan umum lainnya),
  - b. Menguatnya kelembagaan pengawasan di daerah,
  - c. Terciptanya pengawasan mandiri oleh POKMASWAS di daerah,
  - d. Terjalannya koordinasi pengawasan secara terpadu (PPNS Perikanan, Polisi, TNI-AL, dan Masyarakat), dan
  - e. Lestarnya ekosistem perairan (danau) dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
- b. Pelaksanaan kegiatan SISWASMAS melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Berdasarkan data pada Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk dan aktif sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14 *Jumlah POKMASWAS di Provinsi Kalimantan Tengah Pada Tahun 2021*

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah POKMASWAS (Kelompok)</b>	<b>Jumlah POKMASWAS Aktif (Kelompok)</b>
1.	Pulang Pisau	5	5
2.	Kotawaringin Barat	21	6
3.	Barito Selatan	41	4
4.	Seruyan	15	0
5.	Kotawaringin Timur	45	6
6.	Barito Timur	9	5
7.	Palangka Raya	15	15
8.	Barito Utara	18	0
9.	Sukamara	6	6
10.	Kapuas	26	5
11.	Murung Raya	13	0
12.	Katingan	8	1

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah POKMASWAS (Kelompok)	Jumlah POKMASWAS Aktif (Kelompok)
13.	Lamandau	9	0
14.	Gunung Mas	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>231</b>	<b>53</b>

Melihat jumlah POKMASWAS yang telah terbentuk yaitu mencapai 231 kelompok tersebar di semua kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, tentunya diharapkan mampu mengurangi terjadinya pelanggaran atau kegiatan yang merusak kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan yang ada. Namun dilihat dari keaktifannya dalam memberikan laporan terkait pengawasan bidang perikanan hanya ada 53 kelompok yang aktif memberikan laporan dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil laporan operasi pengawasan di perairan selama tahun 2021 terdapat 14 unit kapal penangkap ikan yang diperiksa dan ditemukan 1 (satu) unit kapal pengguna lampara dasar sedang beroperasi menangkap ikan di kawasan Gosong Senggora yang merupakan kawasan konservasi kemudian selanjutnya dilakukan penangkapan dan diproses penegakkan hukum oleh pihak Satpolair Polres Seruyan. Sedangkan dalam hal penanganan tindak pidana perikanan masih memerlukan perhatian yang lebih besar dan dukungan serta koordinasi dari aparat dan masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan banyaknya kasus tindak pidana pelanggaran bidang perikanan yang terjadi dari Tahun 2016 - 2020, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15 *Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020*

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Kenaikan Rata-Rata (%)
Jumlah Kasus Pelanggaran Bidang Perikanan	5 Kasus	29 Kasus	11 Kasus	6 Kasus	0 Kasus	68,12

Jika dilihat pada tabel di atas, pada Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan sehingga pada tahun 2020 tidak terdapat kasus pelanggaran di bidang perikanan. Tetapi apabila dilihat dari kenaikan rata-rata kasus setiap tahun sebesar 68,12% dikarenakan

pada tahun 2017 terjadi kenaikan kasus pelanggaran sebesar 29 kasus. Faktor pendorong terjadinya kasus pelanggaran tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, disebabkan oleh :

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat;
- b. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.

Pencapaian kinerja **IKU-2** pada **Sasaran-5** dinilai Sangat Baik, dimana upaya yang telah dilakukan meliputi kegiatan : kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil, pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil, penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Oleh karena itu untuk ke depan dalam rangka pencapaian kinerja tahun mendatang maka ditempuh strategi yang mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain :

- a. Memperkuat koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral) karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga;
- b. Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda);
- c. Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat;
- d. Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada;
- e. Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.

Dalam rangka optimalisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka membantu kepatuhan pelaku usaha perikanan maupun masyarakat dalam perizinan bidang kelautan dan perikanan maka Dinas Kelautan dan Perikanan mengembangkan aplikasi Geoportal Laut Berkah yang dapat diakses melalui website <https://geoportal-lautberkah.kalteng.go.id/>. Aplikasi ini bermanfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan akses kepada stakeholder dalam proses Perizinan Lokasi Perairan dan perizinan pengelolaan perairan yang berlangsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan SOP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan secara elektronik.

- b. Memberikan kepastian proses yang dapat terpantau secara kekinian / realtime oleh para stakeholder, sebagaimana SOP Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- c. Menyediakan pustaka digital terhadap berbagai proses perizinan dan dokumen terkait, yang bisa diakses dengan lebih cepat tanpa terkendala aspek geografis.
- d. Memudahkan bagi investor yang berminat untuk mendapatkan informasi terkait potensi investasi di perairan Provinsi Kalimantan Tengah.  
Menyediakan peta online yang memiliki informasi terkait potensi investasi yang dapat diakses oleh stakeholder Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil penilaian terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis selama tahun 2021 dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah tercapai dengan Sangat Baik, walaupun ada 3 (tiga) indikator dalam kategori Baik. Hal ini menggambarkan bahwa setiap program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian IKU dikarenakan adanya sinergitas antara pemangku kepentingan, pelaksana maupun masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.

### **3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja seperti tersebut diatas, melainkan juga menyajikan informasi relevan lainnya agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja sesuai dengan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, dimana sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor riil yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan yang didukung oleh tingkat

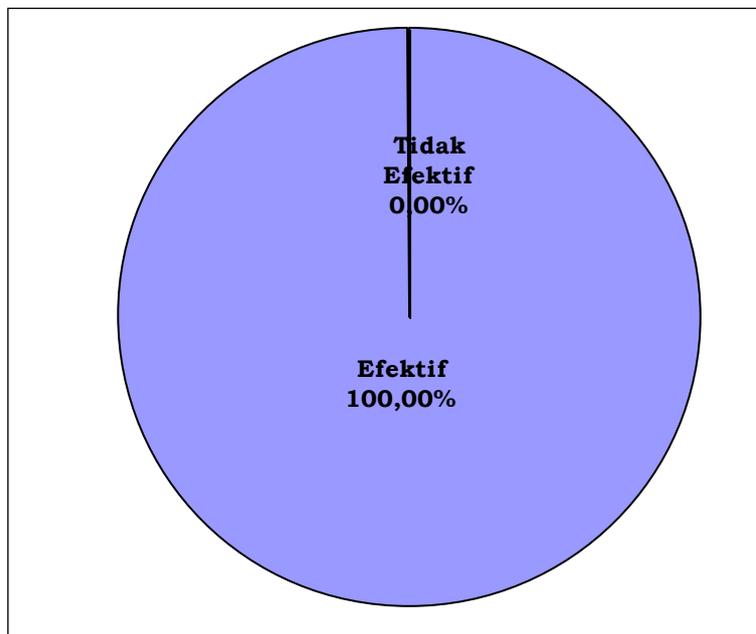
produksi dan sarana/prasarana serta kualitas sumber daya manusia yang memadai.

### **3.3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran**

Demi terwujudnya masyarakat perikanan yang sejahtera melalui pemberdayaan sumberdaya manusia, pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan serta jasa-jasa lingkungan yang terdapat didalamnya maka strategi pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan pada 5 kebijakan yang dijabarkan kedalam 5 (lima) Program Utama dan 50 Kegiatan Utama sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis 2016-2021, artinya terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat efektifitas capaian outcome dari seluruh kegiatan sebesar 100% dinyatakan telah berhasil dalam upaya pencapaian tujuan akhir pelaksanaan program dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan umumnya.

Gambaran tingkat efektifitas capaian outcome dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.4 *Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2021*

Dari 8 (delapan) indikator kinerja Tahun 2021, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang mencapai kategori SANGAT BAIK / BAIK.

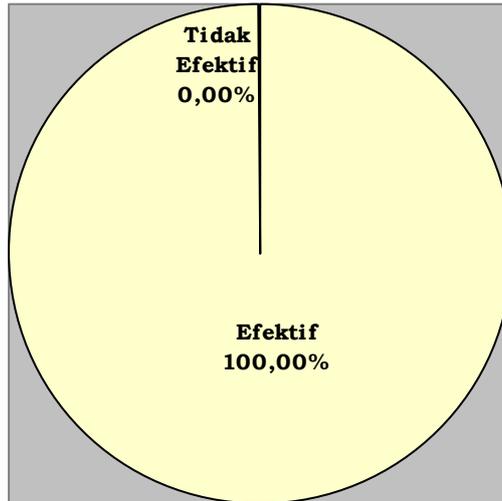
### **3.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam perumusan pencapaian indikator kinerja kegiatan harus diarahkan dan selaras dengan pencapaian sasaran. Adapun sasaran yang dapat dicapai pada Tahun 2021 melalui program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja kegiatan berhasil sebesar 100% dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Indikator keberhasilan tersebut diukur melalui indikator sasaran sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.16 *Perbandingan Indikator Pencapaian dari Target terhadap Realisasi Tahun 2021*

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2021</b>	<b>REALISASI TAHUN 2021</b>	<b>%</b>
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	130.526,10	166.260,00*	127,38
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	119.876,05	121.970,84*	101,75
3	Jumlah produksi benih (ekor)	70.335.000	70.850.000*	100,73
4	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	49,63	54,00*	108,81
5	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	61.362,24	61.362,24	100,00
6	Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50	2,50	100,00
7	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	87,00	87,00	100,00
8	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	40	53	132,50

Berdasarkan data hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan bahwa dari total kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja, semua kegiatan termasuk efektif dalam mewujudkan sasaran. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana pada gambar berikut ini.



Gambar 3.5 Efektifitas Kegiatan terhadap Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17 Kegiatan Yang Secara Individual Tidak Efektif Namun Secara Bersama-sama Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Sasaran strategis yang kurang dapat diwujudkan
-	--	--

Tabel 3.18 Kegiatan Yang Tidak Efektif dan Tidak Efisien dalam Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Sasaran Strategis yang Kurang Dapat Diwujudkan
-	--	--

Namun apabila ditinjau dari pencapaian indikator sasaran Tahun 2021 masih belum sepenuhnya dapat tercapai. Hal tersebut dapat dikatakan ketidaksesuaian aplikasi kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya dilaksanakan untuk menunjang pencapaian keseluruhan sasaran sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan.

### 3.4 Analisis Dampak

Analisis dampak merupakan suatu analisis atau kajian mengenai dampak atau pengaruh penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap kehidupan

manusia dan lingkungan sekitarnya. Dengan mengetahui dampak dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah direncanakan maka suatu kegiatan dapat ditentukan tingkat keberhasilan dan kegunaannya bagi masyarakat, terutama di Kalimantan Tengah.

Sasaran strategis yang direncanakan dan telah dilaksanakan pada Tahun 2021 saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dampak yang bisa dirasakan antara lain sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis-1 : Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap**

Peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan hasil dari adanya upaya melalui kegiatan yang pada tahun sebelumnya telah dilakukan. Sebagai contoh produksi perikanan tangkap, pada Tahun 2021 telah dilakukan berbagai kegiatan berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan (alat tangkap dan kapal/ perahu), baik yang sifatnya penambahan maupun mengganti sarana prasarana nelayan yang telah rusak, diharapkan sebagai salah satu indikator penentu terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap.

Pembangunan perikanan tangkap diarahkan kepada optimalisasi operasional 2 (dua) pelabuhan perikanan yang direkomendasikan untuk dikelola oleh pemerintah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai dan UPT. Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang. Optimalisasi pelabuhan perikanan yang ada ini diharapkan akan menjadikannya sebagai pusat kegiatan operasional nelayan, sehingga aktifitas pelayanan dan data perikanan tangkap dapat dilaksanakan melalui fungsi pelabuhan perikanan. Melalui pelabuhan perikanan, akses pemantauan perijinan perikanan tangkap dapat dilakukan. Dengan optimalnya pelabuhan perikanan ini maka kegiatan perikanan di wilayah pesisir dapat terpantau dan tercatat dengan baik sehingga dapat meningkatkan peran serta nelayan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

**2. Sasaran Strategis-2 : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya**

Dari sisi perikanan budidaya, terdapat upaya melalui bantuan Pengadaan Kolam Sistem Bioflok Lengkap (terpasang), Pengadaan Mesin Pakan Ikan Skala Mini, Pengadaan Pakan, Pengadaan Benih dan bantuan sarana perbenihan yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu pembudidaya untuk dapat meningkatkan produksinya dan memberikan keuntungan baik secara jumlah produksi maupun meningkatkan nilai jual sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pembudidaya.

Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap seharusnya dapat secara langsung meningkatkan produksi produk olahan, hal ini terjadi mengingat sumber bahan baku produk olahan ikan di Kalteng sebagian besar berasal dari hasil tangkapan perairan laut dan umum, yaitu Ikan Tenggiri, Udang, dan Ikan Pipih; dan hasil budidaya, yaitu Patin, Lele, dan Udang.

Peningkatan sentra-sentra unit perbenihan, unit budidaya, dan unit pengolahan memiliki dampak terhadap kualitas produksi perikanan terutama pada produksi perikanan budidaya dan pengolahan. Dengan meningkatnya unit perbenihan yang mendapatkan sertifikat CPIB maka kualitas benih yang digunakan untuk pembudidayaan ikan di Kalimantan Tengah dapat terjamin. Kualitas benih yang terjamin akan menghasilkan ikan budidaya yang bermutu baik. Ikan yang bermutu baik akan menghasilkan produk olahan yang bermutu baik. Apabila kualitas benih, kualitas ikan budidaya, dan kualitas produk olahan menjadi baik maka akan meningkatkan daya jualnya dan meningkatkan pendapatan petani perikanan.

### **3. Sasaran Strategis-3 : Tercapainya Angka Konsumsi Ikan (AKI)**

Peningkatan produksi perikanan pada **Sasaran Strategis-1** dan **Sasaran Strategis-2** juga mempengaruhi rata-rata konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah pada **Sasaran Strategis-3**. Dengan meningkatnya produksi perikanan akan mengakibatkan meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya rata-rata konsumsi ikan masyarakat menjadi sebesar 54,00 kg/kapita/tahun di Tahun 2021, lebih tinggi daripada tingkat konsumsi ikan masyarakat Tahun 2020 yang berada di angka 53,60 kg/kapita/tahun yang mana selama 4 tahun terakhir selalu menunjukkan *trend* kenaikan. Dampak dari tingginya rata-rata konsumsi ikan masyarakat ini antara lain tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan sangat tinggi, meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai gizi yang terkandung dalam daging ikan untuk kesehatan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membeli ikan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga daging. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa program pemerintah untuk memasyarakatkan makan ikan melalui GEMARIKAN (gerakan memasyarakatkan Makan Ikan) berhasil memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah.

**4. Sasaran Strategis-4 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Dengan meningkatnya kawasan konservasi perairan dan jenis yang dikelola secara berkelanjutan berdampak terhadap lingkungan antara lain :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan wilayah perairan laut, wilayah pesisir dan wilayah perairan umum daratan.
- b. Sumberdaya ikan dapat terlindungi dan dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.
- c. Menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan yang dikonservasi.
- d. Menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan konservasi Kalimantan Tengah.

Dampak dari **Sasaran Strategis-4** adalah wilayah pesisir yang rusak dapat dipulihkan kembali dengan melakukan penanaman mangrove. Manfaat penanaman mangrove ini antara lain :

- a. Mencegah intrusi air laut agar air tanah tidak menjadi payau sehingga dapat dikonsumsi.
- b. Mencegah erosi dan abrasi pantai.
- c. Sebagai pencegah dan penyaring alami dari penguraian limbah organik yang sampai ke wilayah pesisir.
- d. Sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa seperti biawak, kura-kura, monyet, burung, ular, juga beberapa jenis hewan laut seperti ikan, udang, kepiting dan siput.

**5. Sasaran Strategis-5 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat. Dengan pemberian bantuan kepada POKMASWAS maka berdampak antara lain :

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penjagaan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan-kegiatan illegal.
- b. Meningkatkan pemantauan terhadap perairan di Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Kalimantan Tengah.
- d. Sumberdaya kelautan dan perikanan dapat terjaga kelestariaannya.

- e. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman dan berkeadilan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2021 telah mempunyai 8 (delapan) indikator kinerja yang tertuang di dalam 5 (lima) sasaran strategis yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan dan meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.

## **B. Realisasi Anggaran**

### **3.5 Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas selain diukur dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, juga diukur dari pengalokasian dan pemanfaatan anggarannya yang tepat sasaran. Dimana mestinya dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta mendukung pelaksanaan kegiatan/ program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah maka telah dialokasikan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jumlah anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 untuk Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian strategis semula berjumlah Rp.15.282.000.000,- dan setelah perubahan anggaran berjumlah Rp.14.333.089.575,- atau ada pengurangan anggaran sebesar Rp.948.910.425,- (6,21%). Pengurangan anggaran ini salah satunya diakibatkan adanya pandemi covid-19 yang tidak hanya melanda Indonesia secara umum namun juga di Kalimantan Tengah secara khusus.

Walaupun dengan adanya pengurangan anggaran tersebut, semua kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tetap dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menghasilkan capaian yang maksimal dari kegiatan yang telah ditetapkan tersebut.

Pada akhir tahun anggaran 2021, realisasi keuangan sebesar Rp.13.636.876.890,- (94,21%). Secara rinci jumlah alokasi dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021 seperti terlihat pada tabel berikut.

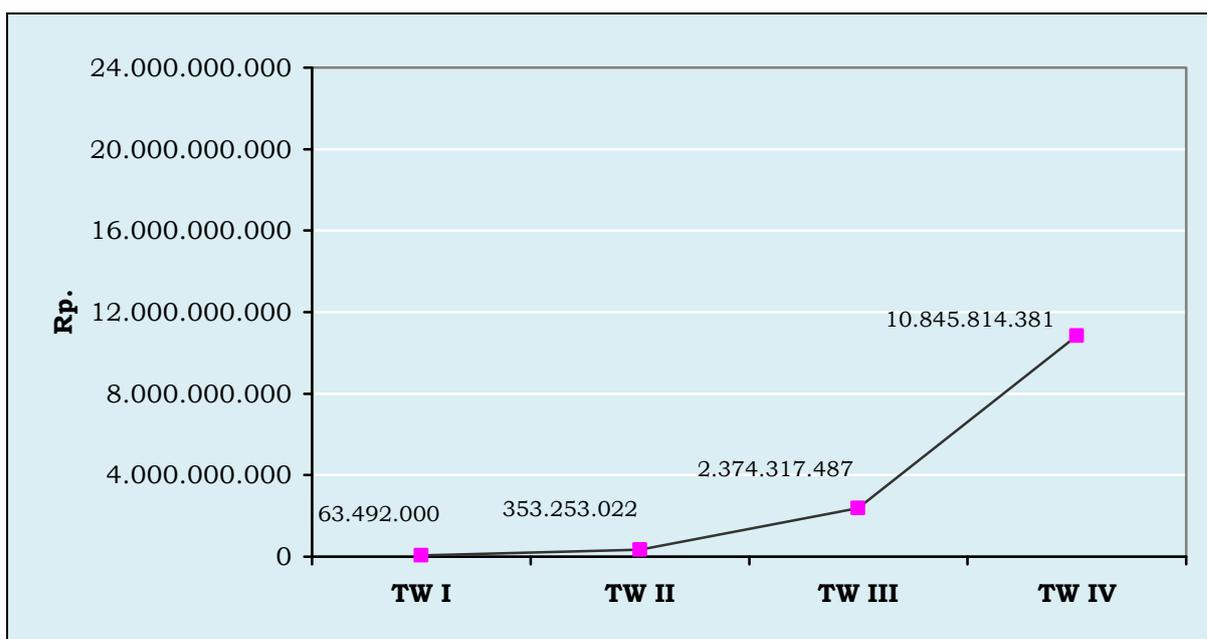
Tabel 3.19 *Jumlah Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	1 Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	9.791.900.000,-	9.229.931.875,-	9.089.648.760,-	98,48
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1 Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	3.410.930.000,-	3.241.386.400,-	2.780.479.650,-	86,00
		2 Jumlah produksi benih (ekor)				
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	1 Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	83.000.000,-	33.836.000,-	31.988.000,-	94,54
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP	1 Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	774.170.000,-	695.897.700,-	664.150.800,-	95,00
		2 Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)				
5	Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP	1 Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	1.222.000.000,-	1.132.037.600,-	1.070.609.680,-	97,05
		2 Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)				
<b>TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS</b>			<b>15.282.000.000,-</b>	<b>14.333.089.575,-</b>	<b>13.636.876.890,-</b>	<b>94,21</b>

Perkembangan daya serap keuangan per triwulan untuk Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20 *Perkembangan Daya Serap Keuangan Per Triwulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	PROGRAM	Jumlah Anggaran (Rp.)		Realisasi (Rp.)			
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	1 Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	130.526,10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	9.791.900.000,-	9.229.931.875,-	22.557.000	74.716.522	1.592.934.687	7.399.440.551
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1 Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	119.876,05	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.410.930.000,-	3.241.386.400,-	21.145.000	26.928.500	278.431.800	2.453.974.350
		2 Jumlah produksi benih (ekor)	70.335.000							
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	1 Angka konsumsi ikan (kg/kap/ tahun)	49,63	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	83.000.000,-	33.836.000,-	0	4.900.000	27.088.000	0
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP	1 Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	61.362,24	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	774.170.000,-	695.897.700,-	0	179.761.000	18.350.400	466.039.400
		2 Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50							
5	Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP	1 Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	87,00	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.222.000.000,-	1.132.037.600,-	19.790.000	66.947.000	457.512.600	526.360.080
		2 Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	40,00							
<b>TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS</b>					<b>15.282.000.000,-</b>	<b>14.333.089.575,-</b>	<b>63.492.000</b>	<b>353.253.022</b>	<b>2.374.317.487</b>	<b>10.845.814.381</b>



Gambar 3.6 Grafik Perkembangan Daya Serap Anggaran Tahun 2021 Belanja Per Triwulan

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan daya serap anggaran belanja Triwulan I sampai Triwulan III cukup stabil kenaikannya, sedangkan kenaikan pada Triwulan IV sangat drastis, dikarenakan sebagian besar realisasi keuangan yang mengikuti realisasi fisik pekerjaan, khususnya pekerjaan pengadaan barang/ jasa, terjadi pada Triwulan IV.

Realisasi keuangan di akhir Tahun 2021 hanya mampu mencapai angka 94,21%. Tidak optimalnya pencapaian realisasi keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 ini disebabkan oleh : (a) Kelebihan penganggaran belanja langsung (gaji, tunjangan, dan sebagainya); (b) Sisa atau kelebihan harga pelelangan/pengadaan barang/jasa, dan (c) Kelebihan hasil kegiatan yang tidak terealisasi. Walaupun demikian, secara umum pelaksanaan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggap telah sebagian besar memenuhi prinsip hemat, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undang dan ketentuan yang berlaku.

## BAB IV PENUTUP

**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara formal merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Media pertanggungjawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*).

Dengan demikian disamping LKIP sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam :

- a. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
- b. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
- c. Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;
- d. Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil;
- e. Meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang.

### 4.1 Capaian Kinerja IKU

Penilaian hasil akhir capaian indikator kinerja utama (IKU) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulanan selama Tahun 2021, dengan mengacu pada RENSTRA PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Penetapan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang telah disepakati dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Penilaian ini dilakukan oleh tim dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

Dari hasil penilaian terhadap 8 (delapan) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum kinerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah cukup baik, dengan 5 (lima) indikator kategori Sangat Baik dan 3 (tiga) indikator dalam kategori Baik.

Terdapat 3 (tiga) indikator dengan kategori BAIK (hijau), yaitu pada indikator kinerja berikut ini:

- a. Sasaran : **Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP** dengan indikator *Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha)* dengan tingkat capaiannya sebesar **100,00 %**;
- b. Sasaran : **Meningkatnya kualitas pengelolaan, rehabilitasi, dan konservasi SDKP** dengan indikator *Jumlah Luasan rehabilitasi Kawasan Pesisir (Ha/Tahun)* dengan capaian sebesar **100,00 %**; dan
- c. Sasaran : **Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP** dengan indikator *Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)* dengan tingkat capaiannya sebesar **100,00 %**.

Sedangkan prestasi kinerja kategori SANGAT BAIK (biru) dicapai pada indikator kinerja berikut ini :

- a. Sasaran : **Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap** dengan indikator *Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)* sebesar **127,38%**;
- b. Sasaran : **Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)* sebesar **101,75%**;
- c. Sasaran: **Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya** dengan indikator *Jumlah Produksi Benih (ekor/ tahun)* sebesar **100,73%**.
- d. Sasaran : **Tercapainya Angka Konsumsi Ikan** dengan indikator *Angka Konsumsi Ikan (kg/ kap/ tahun)* sebesar **108,81%**; dan
- e. Sasaran : **Meningkatnya kualitas pengawasan SDKP** dengan indikator *Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POMASWAS) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)* sebesar **132,50 %**.

Data lengkap prestasi capaian kinerja 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 termasuk yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai berikut : (i) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) mencapai 127,38% (Kategori SANGAT BAIK); (ii) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) mencapai 101,75% (Kategori SANGAT BAIK); (iii) Jumlah Produksi Benih (Ekor) mencapai 100,73% (Kategori SANGAT BAIK); (iv) Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun) mencapai 108,81 % (Kategori SANGAT BAIK); (v) Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha) mencapai 100,00% (Kategori BAIK); (vi) Jumlah Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir (Ha) mencapai 100,00% (Kategori BAIK); (vii) Persentase Pelaku Usaha Yang Patuh Terhadap Ketentuan/

UU yang Berlaku (%) mencapai 100,00% (Kategori BAIK); (viii) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Berperan Aktif Dalam Pengawasan Pemanfaatan SDKP (Kelompok) mencapai 132,50% (Kategori SANGAT BAIK).

Untuk penilaian kinerja keuangan terkait dukungan terhadap kegiatan strategis diukur melalui realisasi keuangan. Di tahun 2021 realisasi keuangan terhadap program/ kegiatan terkait kegiatan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai Rp.13.636.876.890,- (94,21%) dari pagu anggaran Rp.14.333.089.575,-.

#### **4.2 Permasalahan**

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja selama Tahun 2021, yaitu meliputi :

- a. Lemahnya data perikanan karena proses pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan yang terintegrasi di pusat membuat data-data terkait produksi perikanan dan angka konsumsi ikan Kalimantan Tengah dapat diketahui angka tetapnya setelah melalui proses validasi per semester di tingkat pusat;
- b. Tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan biaya produksi tinggi, dimana kenaikan harga pakan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan konsumsi sehingga menyebabkan pembudidaya mengalami kerugian, akibatnya banyak pembudidaya yang mengurangi kegiatan usahanya;
- c. Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan;
- d. Terjadinya perubahan musim yang ekstrim sehingga mengakibatkan produksi budidaya ikan menjadi menurun karena banyak benih ikan yang mengalami kematian.
- e. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap.
- f. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- g. Pengaruh cuaca yang ekstrim sehingga mengakibatkan gelombang tinggi di laut, dimana mempengaruhi jumlah trip operasi penangkapan.
- h. Bahan bakar yang mahal, sulitnya mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi bagi nelayan, sehingga mengakibatkan berkurangnya trip penangkapan.
- i. Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap.

- j. Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.
- l. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan biaya operasional penyidik perikanan untuk melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak pidana perikanan oleh masyarakat;
- m. Kurangnya SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas.
- n. Terjadinya pandemic covid-19 yang membuat aktivitas pelaku usaha perikanan tidak berjalan dengan maksimal.

#### **4.3 Upaya Tindak Lanjut**

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian target indikator ke depan antara lain :

- 1) Sejak 2017, fokus perikanan tangkap adalah rehabilitasi/ pembangunan/ pengembangan pelabuhan perikanan, yaitu dengan dimulainya Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai melalui pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kedepannya, penyelesaian Rehabilitasi/ Pembangunan Lanjutan Dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai akan terus dikerjakan sampai dengan 2021, sambil tetap menyiapkan kelengkapan dokumen pengembangan/ pembangunan pelabuhan perikanan lainnya.
- 2) Mendorong percepatan operasional unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- 3) Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba.
- 4) Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya.
- 5) Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR.
- 6) Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil, pengembangan diversifikasi produk olahan, pameran dan promosi produk hasil perikanan, serta ragam produk olahan bernilai tambah.
- 7) Karena dalam pengawasan di laut melibatkan banyak pihak/instansi/lembaga, sehingga diperlukan sebuah koordinasi antar lembaga pemerintah (pembentukan forum pengelola perairan lintas sektoral).

- 8) Memperkuat payung hukum pengelolaan (Perda dan sosialisasi Perda).
- 9) Penguatan/pembinaan dan pembentukan lembaga pengelola perairan ditingkat masyarakat.
- 10) Peningkatan SDM (PPNS) pengawas perikanan dan peningkatan kualitas PPNS yang sudah ada.
- 11) Penguatan lembaga adat dan kearifan lokal lainnya.
- 12) Ikut mensosialisasikan program-program pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 di Kalimantan Tengah dan mengoptimalkan peran media sosial maupun website yang dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalin komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, stakeholder terkait, pelaku usaha perikanan dan masyarakat luas.

Dengan demikian diharapkan laporan kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan dari LKIP. Tentunya harapan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya secara berkelanjutan dapat tercapai.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email: [dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

**H. SUGIANTO SABRAN**

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS,

**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email: [dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	130.526,1
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	119.876,05
		Jumlah produksi benih (ekor)	Ekor	70.335.000
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	Kg/kap/tahun	49,63
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	Ha	61.362,24
		Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	Ha	2,50
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	%	87,00
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	Kelompok	40,00

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Rp. 7764.170.000,-	
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 3.410.930.000,-	
3.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 1.222.000.000,-	
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 83.000.000,-	
5.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 9.791.900.000,-	

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

**H. SUGIANTO SABRAN**

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS,

**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email:[dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id)

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**

Jabatan : **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

**H. SUGIANTO SABRAN**

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS,

**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 3229663 Website: [www. dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email:[dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id)

---

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi:

Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT), penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 *Gross Tonnage* (GT);
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh gubernur.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah produksi perikanan tangkap yang terealisasi dibagi target produksi perikanan tangkap dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
2	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya yang terealisasi dibagi target produksi perikanan budidaya dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
		Jumlah produksi benih (ekor)	Jumlah produksi benih yang terealisasi dibagi target produksi benih dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
3	Tercapainya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan (AKI)(kg/kap/tahun)	AKI yang terealisasi dibagi target AKI dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Rehabilitasi, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Optimal	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	Luasan kawasan konservasi perairan yang terealisasi dibagi target luasan kawasan konservasi perairan dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
		Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	Luasan kawasan pesisir yang telah direhabilitasi dibagi target luasan kawasan pesisir yang direhabilitasi dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	Realisasi persentase capaian dibagi target persentase capaian dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	Realisasi jumlah POKMASWAS yang aktif dibagi target jumlah POKMASWAS aktif dikalikan seratus	Dislutkan Kalteng

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

  
H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS,

  
Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011